



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

REVISI PERTAMA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2022



**REVISI PERTAMA
RENCANA BISNIS ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2022**

Jakarta, Oktober 2022

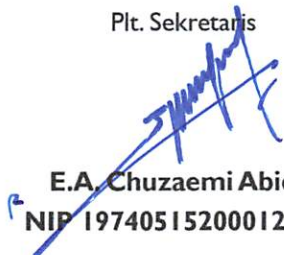
Disahkan Pimpinan/Pejabat Pengelola BLU

Kepala/Pimpinan BLU
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Muhammad Aqil Irham
196912111994031005

Plt. Sekretaris



E.A. Chuzaemi Abidin
NIP 197405152000121001

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi



Siti Aminah
NIP 197003171994032002

Plt. Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengawasan JPH



Khotibul Umam
NIP 196401091994031003

Plt. Kepala Pusat Kerjasama dan
Standardisasi Halal



Muchamad Sidik Sisdiyanto
NIP 1976112520021210 03

Jakarta, Oktober 2022

Diketahui
Dewan Pengawas



Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag 
NIP 196403211992031003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2023 revisi pertama telah selesai disusun. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH.


Revisi pertama RBA ini disusun karena adanya penyesuaian target pendapatan BLU, dan adanya perubahan struktur kerja BLU dengan ditetapkannya PMA Nomor 72 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Dengan revisi pertama RBA ini, diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kualitas output dan outcome dalam bidang layanan registrasi dan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama dan standardisasi halal. Selain itu, diharapkan dokumen ini menjadi pegangan seluruh unit kerja di BPJPH dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga tersusunnya Revisi Pertama Rencana Bisnis dan Anggaran ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penyusunan RBA, sekaligus juga perbaikan kinerja BPJPH ke depan.

Jakarta, Oktober 2022

Kepala/Pimpinan BLU



Muhammad Aqil Irham





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	4
A. UMUM.....	4
B. VISI DAN MISI BLU	6
C. BUDAYA BLU	7
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS.....	7
BAB II KINERJA BPJPH TAHUN 2022, DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2023	19
A. GAMBARAN KONDISI BPJPH.....	19
B. RENCANA KINERJA LAYANAN BLU	41
C. RENCANA KINERJA KEUANGAN.....	46
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN.....	61
BAB III PENUTUP.....	59
A. ANALISIS.....	65
B. KESIMPULAN.....	67
C. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Tahun 2023	10
Tabel 2.1 Progress Penyusunan Standar Jaminan Produk Halal Tahun 2022.....	20
Tabel 2.2. Anggaran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2018 s.d. 2022 (dalam ribuan)	21
Tabel 2.3. Jumlah SDM BPJPH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022	22
Tabel 2.4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2022.....	24
Tabel 2.5. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2022	32
Tabel 2.6. Penetapan Tarif BLU BPJPH.....	34
Tabel 2.7. Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH.....	35
Tabel 2.8. Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH	36
Tabel 2.9. Asumsi Volume Layanan Tahun 2023.....	39
Tabel 2.10. Asumsi Total Pendapatan Tahun 2023.....	40
Tabel 2.11. Asumsi Rencana Biaya BPJPH Tahun 2023	41
Tabel 2.12. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	42
Tabel 2.13. Capaian Kinerja Tahun 2021 Selaku BLU	42
Tabel 2.14. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022	43
Tabel 2.15. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022 Selaku BLU	43
Tabel 2.16. Target Kinerja Tahun 2023.....	44
Tabel 2.17. Target Kinerja Tahun 2023 Selaku BLU	45
Tabel 2.18. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2021 dan 2022	46
Tabel 2.19. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2023.....	48
Tabel 2.20. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2021 dan 2022	49
Tabel 2.21. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2023	50
Tabel 2.22. Pendapatan dan Belanja Agregat	51
Tabel 2.23. Komposisi Sumber Dana Belanja BPJPH.....	51
Tabel 2.24. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	52
Tabel 2.25. Target Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	52
Tabel 2.26. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2023.....	55
Tabel 2.27. Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2022 s.d. 2026.....	58
Tabel 2.28. Prakiraan Maju Belanja Tahun 2022 s.d. 2026	59
Tabel 2.29. Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan.....	60
Tabel 3.1. Analisis Aspek Keuangan.....	67
Tabel 3.2. Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPJPH	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH	9
---	---



RINGKASAN EKSEKUTIF

Halal adalah pasar global yang berdasarkan kebutuhan dan preferensinya diperkirakan mencapai 1,8 miliar Muslim di seluruh dunia. Arancha Gonzalez, *Executive Director International Trade Centre*, menyebutkan bahwa Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka akan kehilangan kesempatan yang signifikan dari hulu sampai ke hilir. Hal ini menciptakan peluang bagi para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan dari sektor halal.

Di sisi lain, berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar 237.641.326 jiwa. Jumlah penduduk muslim mencapai 209,12 juta jiwa, yakni 87% dari total penduduk. Di tahun 2020 diproyeksikan jumlah penduduk meningkat sebanyak 271.066 ribu begitu pula dengan jumlah penduduk muslim yang tentunya akan ikut meningkat.

Sejalan dengan hal itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hadir ditengah kondisi tersebut, dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Hal ini akan memberikan kesempatan yang besar kepada para pelaku usaha untuk bersaing di sektor pasar halal dunia.

BPJPH dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 dimana Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini juga diperkuat dengan di terbitkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim Indonesia untuk menikmati produk halal. Dalam perjalanannya untuk dapat terlaksananya UU tersebut diterbitkan Peraturan Pelaksana yakni PP Nomor 31 tahun 2019 sebagai amanat tentang peraturan pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014. Dan diterbitkan pula Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 sebagai pedoman penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Di tengah mulai beroperasinya layanan, BPJPH kembali dihadapkan pada perubahan regulasi yang mengubah bisnis proses, yaitu ditetapkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 39 tahun 2021. Dengan demikian BPJPH harus menyesuaikan bisnis prosesnya sesuai regulasi yang baru tersebut.

Layanan BPJPH, saat ini sudah dapat dipantau oleh masyarakat dengan sudah beroperasinya layanan secara *online* melalui ptsp.halal.go.id maupun *offline* melalui PTSP pusat dan bantuan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi. Namun demikian, tetap diperlukan strategi-strategi lain dalam upaya peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya label halal untuk menjamin kehalalan produk yang digunakan atau dikonsumsi.

Peran Satuan Tugas (Satgas) layanan JPH di daerah, dalam mensosialisasikan sertifikasi halal juga menjadi penting karena masing-masing wilayah memiliki demografi yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda pula dalam mensosialisasikan maupun memproses layanan sertifikasi halal.

Agar target pencapaian layanan sertifikasi halal dapat terlaksana, perlu diimbangi dengan jumlah LPH yang memadai. Sejauh ini, sudah ada 30 LPH, namun banyaknya jumlah Pelaku Usaha di Indonesia, dan dinamisnya perkembangan produk memerlukan LPH yang mampu menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu, tersedianya LPH diseluruh propinsi menjadi fokus BPJPH di tahun 2023.

Pada tahun anggaran 2021, pagu anggaran BPJPH telah mengalami beberapa penyesuaian. Penyesuaian ini sebagai tindak lanjut dan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 melalui refocusing. Pagu awal yang diterima BPJPH sebesar Rp97.497.916.000,- kemudian mengalami refocusing sehingga pagu BPJPH menjadi Rp74.475.259.000,-, artinya terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp23.022.657.000,- atau sebesar 23,61%.

Sepanjang tahun 2021, target belanja telah terealisasi sebesar 99,06%. Pagu anggaran sebesar Rp68.723.713.000,- dengan rincian alokasi Sekretariat sebesar Rp50.798.967.000,- realisasi sebesar Rp50.682.563.176,-. Kemudian alokasi sebesar Rp9.728.187.000,- untuk pelayanan registrasi dan sertifikasi halal, realisasi sebesar Rp9.537.927.098,-. Selanjutnya, Rp3.789.038.000,- dialokasikan untuk Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dengan realisasi sebesar Rp3.667.022.118,-. Sedangkan Rp4.407.521.000,- dialokasikan untuk Kerja Sama dan Standardisasi Halal, dengan realisasi sebesar Rp4.190.877.741,-.

Tahun 2022, target penerimaan pendapatan sebesar Rp8.800.000.000,- dan pagu anggaran sebesar Rp114.190.163.000,- ditambah dengan alokasi anggaran PEN sebesar 74.612.000.000 sehingga mengubah rincian alokasi, yakni Sekretariat sebesar Rp56.352.742.000,-. Kemudian alokasi sebesar Rp106.612.000.000,- untuk pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal. Selanjutnya Rp12.537.421.000,- dialokasikan untuk Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Dan Rp13.300.000.000,- dialokasikan untuk Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 3/KMK.05/2019 BPJPH menjadi Pengelola Keuangan Badan Layanan umum. Dengan menjadi Pengelola BLU, BPJPH memasuki babak baru dalam pengelolaan keuangan organisasi pemerintah. Pada tahun 2021, BPJPH menargetkan pendapatan sebesar Rp150.000.000,- akan tetapi realisasi pendapatan sampai bulan Desember sebesar Rp14.000.000,-. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Kepala Badan, baru dapat diselesaikan pada bulan November 2021.

Untuk tahun 2023, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang mulai membaik, disusun asumsi-asumsi yang digunakan untuk penyusunan anggaran tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai tukar Rupiah terhadap USD Rp14.350;
2. Tarif layanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal diproyeksikan menghasilkan pendapatan sebesar Rp12.037.718.000,-;
3. Penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman akan berakhir pada 17 Oktober 2024; dan
4. Penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal bagi produk selain makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minum sudah dimulai sejak 17 Oktober 2021.

Berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana tersebut di atas, untuk tahun anggaran 2023 BPJPH mengusulkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp336.599.809.000,- dan target penerimaan pendapatan BLU sebesar Rp12.037.718.000,-.



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, kosmetik, peralatan rumah tangga berpengaruh terhadap pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku dari yang bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa genetik. Pengolahan produk dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut memungkinkan adanya percampuran antara yang halal dan haram, baik disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan produk perlu kajian khusus yang membutuhkan multidisiplin Ilmu Pengetahuan.

Produk didefinisikan sebagai barang dan/atau jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah simbol kualitas, aman bagi tubuh, dan menentramkan jiwa.

Pengkajian halal suatu produk telah mendorong berdirinya pusat riset halal atau lembaga pemeriksa halal di seluruh dunia. Lembaga Pemeriksa Halal menjadi sangat penting dalam manajemen pengelolaan halal di suatu negara. Selain keberadaan lembaga pemeriksa halal, hal penting dalam siklus halal adalah edukasi masyarakat untuk mengonsumsi produk halal dan edukasi pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Terkait edukasi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal, pada tataran pengetahuan (kognisi) masyarakat muslim Indonesia sepenuhnya memahami apa yang halal sesuai aturan syariat. Hasil penelitian Balitbang Diklat tahun 2011 menunjukkan lebih dari 91% masyarakat muslim Indonesia memiliki pengetahuan yang tinggi terkait konsep halal. Terkait pentingnya labelisasi halal pada produk kemasan, ada 96% masyarakat muslim Indonesia menghendaki bahwa produk yang beredar di masyarakat memiliki kejelasan informasi kehalalannya.

Dalam UUD 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara perlu hadir untuk memfasilitasi, melindungi dan menjamin keamanan bagi warga negara yang melaksanakan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat muslim, karena itu hak masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk halal. Oleh karena itu, UU Nomor

33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan refleksi perlindungan negara terhadap masyarakat untuk memperoleh jaminan dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal.

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan produk yang halal atau yang tidak halal dengan label atau keterangan tertentu yang mudah dilihat, mudah dibaca, tidak mudah terhapus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam UU Nomor 33 tahun 2014 adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Untuk mewujudkan tujuan UU Nomor 33 Tahun 2014 maka perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH. Badan ini setingkat Eselon I, dibawah Kementerian Agama, yang penyelenggaraannya bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Struktur Organisasi ini dapat membentuk perwakilan di daerah, bekerjasama dengan Kementerian lainnya dan MUI/ Ormas atau Lembaga lainnya.

Secara umum BPJPH bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, norma, standard, prosedur jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal, sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal, akreditasi lembaga pemeriksa halal serta memperluas kerjasama kelembagaan dalam mendukung dan memperluas jaminan produk halal. Pembentukan BPJPH mempunyai keuntungan yang lebih luas bagi negara. Setidaknya ada dua hal yaitu: memberikan ketenangan kepada masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk halal. Negara menjamin setiap produk yang beredar di masyarakat ada kepastian kehalalannya. Keuntungan yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, sesuai Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki kewenangan:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal;
3. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
4. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
6. melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal;
7. melakukan registrasi auditor halal;
8. melakukan pengawasan terhadap lembaga pemeriksa halal;
9. melakukan pembinaan terhadap lembaga pemeriksa halal, dan
10. melakukan kerja sama dengan Lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggara jaminan produk halal.

Sebagai Instansi pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, BPJPH menyelenggarakan layanan:

1. Layanan Sertifikasi;
2. Layanan Akreditasi
3. Layanan Registrasi;
4. Layanan Pelatihan Auditor dan Penyelia Halal;
5. Layanan Sertifikasi Auditor dan Penyelia Halal; dan
6. Layanan Penunjang.

Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki relevansi dengan meningkatnya permintaan akan produk halal di dunia setiap tahunnya. Pasar produk halal dunia diprediksi meningkat signifikan seiring dengan meningkatnya populasi muslim dunia. Ada 10 sektor halal *life style* yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dunia, yaitu: makanan, keuangan, perjalanan, kosmetik, pendidikan, pakaian, wisata rekreasi, farmasi, kedokteran dan kesehatan, seni dan budaya.

Menurut data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah ± 237,6 juta jiwa dengan proporsi 88% penduduk adalah muslim. Selain itu Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah mendorong Indonesia berpeluang menjadi pusat halal dunia. Tidak hanya sebagai produsen atau konsumen akan tetapi juga menjadi pusat riset halal dunia.

BPJPH Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan hal tersebut akan tetapi perlu kerjasama lintas kementerian dan lintas kelembagaan. Tantangan terdekat BPJPH adalah meyakinkan publik sebagai lembaga pemerintah yang dapat berperan sebagai regulator dan katalisator peredaran produk halal di Indonesia. Regulator berarti bertanggung jawab dalam hal pembuat kebijakan yang menyangkut kepentingan halal di Indonesia. Katalisator berarti penggerak, penumbuh, dan pemercepat segala kepentingan terkait halal di Indonesia.

B. VISI DAN MISI BLU

Visi:

“Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”

Misi

Untuk mewujudkan visi Badan Layanan Umum BPJPH “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia” maka BPJPH memiliki misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;

3. Mewujudkan kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri dan mengembangkan standardisasi jaminan produk halal, serta akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
4. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung tatakelola organisasi yang baik; dan
5. Mengembangkan unit usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

C. BUDAYA BLU

Nilai-nilai Budaya Kerja Badan Layanan Umum BPJPH terdiri atas 5 (lima) kata, yaitu:

1. Sinergitas: Membangun kerjasama internal yang produktif dan berkomitmen mencapai tujuan yang sama serta kerjasama eksternal yang harmonis;
2. Integritas: Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar serta mematuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
3. Inovasi: Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik
4. Profesionalitas: Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik serta melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan; dan
5. Pelayanan: Berorientasi memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, responsif, tepat waktu, dan transparan.

Nilai-nilai tersebut di atas menjadi komitmen bagi Pejabat Pelaksana Kegiatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum BPJPH (PPK BLU), yang disingkat menjadi SIIPP.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjalankan fungsi:

1. koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
5. pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:

1. Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal;
3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan

4. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Untuk menciptakan tata kelola yang baik yang juga berpedoman pada Organisasi Tata Kelola PK-BLU sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Pejabat pengelola BLU terdiri atas:

1. Pemimpin;
2. Pejabat Keuangan; dan
3. Pejabat Teknis.

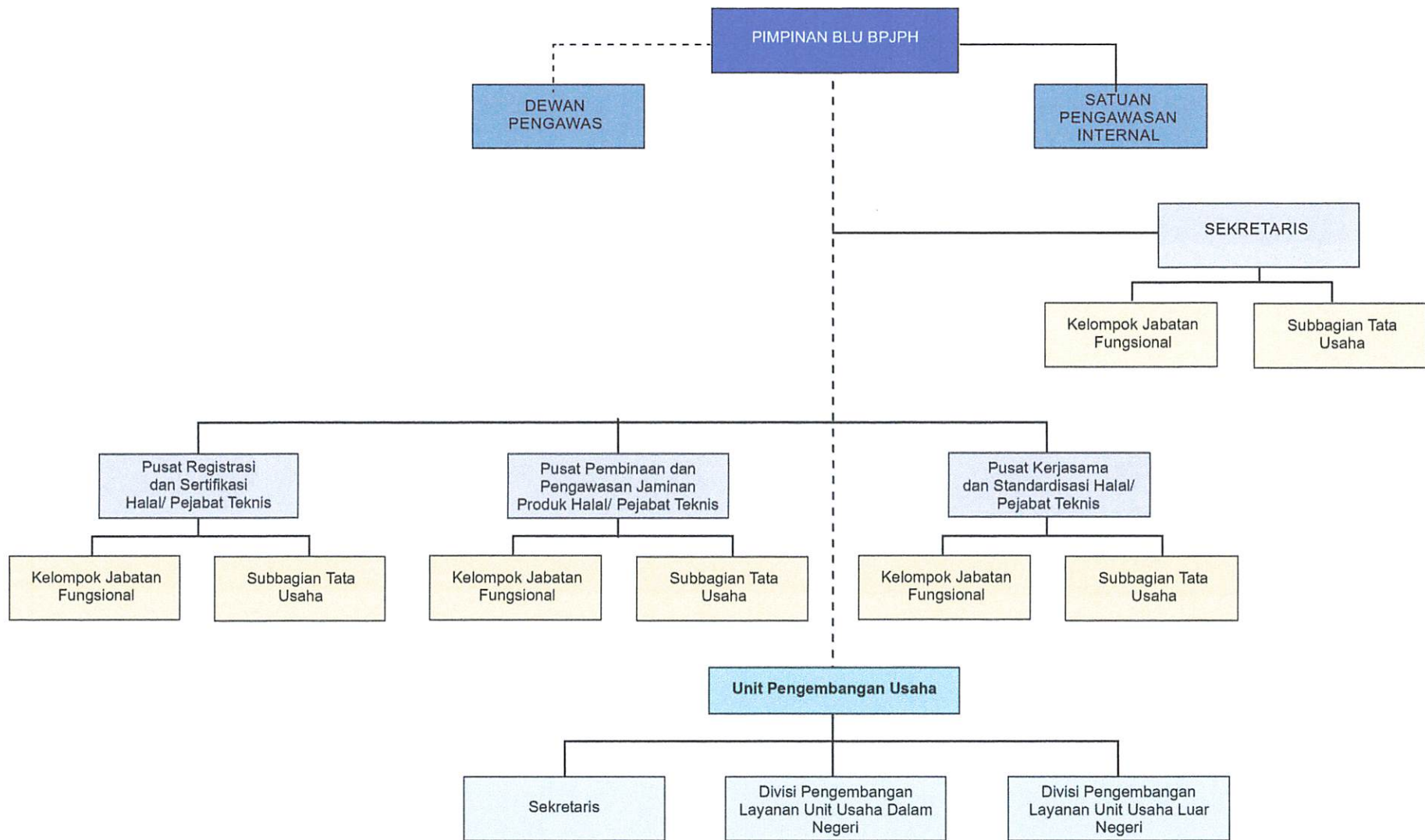
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Struktur Organisasi BPJPH sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum terdiri atas satu Pemimpin BLU, satu Pejabat Keuangan BLU, dan tiga Pejabat Teknis BLU. Pemimpin dijabat oleh Kepala BPJPH, Pejabat Keuangan dijabat oleh Sekretaris Badan, Pejabat Teknis dijabat oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Selain itu, untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang mendukung kegiatan BLU, BPJPH membentuk Unit Pengembangan Usaha melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 124 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengembangan Usaha Badan Layanan Umum BPJPH.

Struktur Unit pengembangan usaha (UPU) terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretaris;
3. Ketua Divisi Pengembangan Layanan Unit Usaha Dalam Negeri
4. Ketua Divisi Pengembangan Layanan Unit Usaha Luar Negeri

Berikut struktur organisasi pengelolaan keuangan BLU BPJPH:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Tahun 2023

No.	Jabatan		Nama
1	Pimpinan BLU	:	Muhammad Aqil Irham
2	Pejabat Keuangan	:	E.A. Chuzaemi Abidin
3	Pejabat Teknis		
	Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	:	Siti Aminah
	Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	:	Khotibul Umam
	Bidang Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal	:	Muchamad Sidik Sisdiyanto
4	Satuan Pengawasan Internal	:	Mohamad Fitri
5	Dewan Pengawas	:	Nizar Ali
6	Unit Pengembangan Usaha	:	Nadra Yetti

1. Pimpinan BLU

Kepala BPJPH berfungsi sebagai Pemimpin BLU yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pelayanan jasa BPJPH. Tugas Pemimpin BLU adalah menjamin terselenggaranya tujuan, sasaran dan program BPJPH untuk mewujudkan visi dan misi BPJPH, dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Kewajiban Pemimpin BLU adalah sebagai berikut:

- 1) memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis Strategis (RSB) BPJPH dan menjamin kesiapan RSB;
- 2) memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan BPJPH dan menjamin kesiapan RBA;
- 3) mengusulkan calon Pejabat Keuangan Umum, Pejabat Teknis, dan Kepala Bidang Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 4) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan periodik BPJPH kepada pejabat yang berwenang.

2. Pejabat Keuangan

Pejabat Pengelola Keuangan diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan. Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban:

- 1) mengoordinasikan penyusunan RBA;
- 2) menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
- 3) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- 4) menyelenggarakan pengelolaan kas;

- 5) melakukan pengelolaan utang-piutang;
- 6) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
- 7) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- 8) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- 9) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan selaku Pejabat Keuangan dibantu oleh:
 - a) Bagian Keuangan dan Umum
 - b) Kelompok Pejabat Fungsional

a) Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengembangan sistem informasi. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan pada Badan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada Badan;
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
4. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
5. Pemeliharaan barang milik negara.

3. Pejabat Teknis

Kepala Pusat sebagai Pejabat Teknis dalam pelayanan jasa diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Pejabat Teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:

- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- 2) melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- 3) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Tugas Pejabat Teknis adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan jasa dibidangnya masing-masing, yaitu:

a. Pejabat Teknis Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Pejabat Teknis Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, memiliki fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;

2. peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
3. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
6. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; dan
7. pelaksanaan administrasi direktorat.

b. Pejabat Teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pejabat Teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, memiliki fungsi:

1. perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
2. peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
3. fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha dan pengawasan jaminan produk halal;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
6. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan
8. pelaksanaan administrasi direktorat.

c. Pejabat Teknis Bidang Kerjasama dan Standardisasi Halal Kegiatan dan Layanan Jasa Akreditasi dan Kerjasama

Pejabat Teknis Bidang Kerjasama dan Standardisasi Halal Kegiatan dan Layanan Jasa Akreditasi dan Kerjasama, memiliki fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
2. peningkatan layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
3. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;

6. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal; dan
9. pelaksanaan administrasi direktorat.

4. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Satuan Pengawasan Internal adalah satuan fungsional yang bertugas mendukung kegiatan BPJPH dalam pemeriksaan Intern dalam lingkup kegiatan dan pelayanan jasa BPJPH. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala BPJPH dengan persetujuan Pejabat Kementerian Agama, serta bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH. Kepala Satuan Pengawasan Internal diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas, yaitu:

- 1) menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
- 2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- 3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- 5) membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;
- 6) memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
- 7) memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU;
- 8) melakukan reviu laporan keuangan;
- 9) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- 10) menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
- 11) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pengawasan Internal memiliki wewenang dalam:

- 1) mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik Aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- 2) melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/ atau Dewan Pengawas;
- 3) mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLU dan/ atau Dewan Pengawas;

- 4) melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah; dan
- 5) mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

5. Dewan Pengawas

Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas tersebut, dilaksanakan dengan:

- 1) menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- 2) memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 3) memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola BLU;
- 4) mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- 5) memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit Satuan Pengawasan Internal;
- 6) menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:

- 1) memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, Pejabat Pengelola BLU mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- 2) melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- 4) menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas berwenang untuk :

- 1) mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;

- 2) mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3) mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- 4) mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/atau pegawai BLU
- 5) mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
- 6) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
- 7) meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- 8) memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLU;
- 9) meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan/atau Menteri Keuangan; dan
- 10) melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas sebagai berikut:

- 1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) yang terdiri atas unsur pejabat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU BPJPH. Salah seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- 2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pejabat/pegawai BPJPH, Pejabat/Pegawai Kementerian Agama, Pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, atau profesional.
- 3) Persyaratan umum seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
 - c. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. Bukan anggota atau pengurus partai politik;
 - e. Bukan calon anggota legislatif, dan/ atau anggota legislatif;
 - f. Bukan calon kepala/ wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;
 - g. Bukan pegawai BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLU;
 - h. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - i. Tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi

- anggota direksi/komisaris/ dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan
- k. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola BLU maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
- 4) Persyaratan khusus seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang:
 - a) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas); dan
 - b) Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dibidang yang berkaitan dengan kegiatan BLU.
 - 4) Dalam mengajukan calon Dewan Pengawas dilengkapi dengan informasi kompetensi yang terdiri dari Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) dan Salinan/fotocopy ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat berwenang.
 - 5) Menteri Agama menyampaikan surat usulan anggota Dewan Pengawas yang telah lulus pengujian persyaratan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
 - 6) Remunerasi Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Agama.
 - 7) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dan sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan.
 - 8) Apabila oleh suatu sebab jabatan Dewan Pengawas kosong, maka Menteri Agama berwenang untuk menetapkan penggantinya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
 - 9) Seorang Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis oleh Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Keuangan.
 - 10) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dari Jabatannya dilakukan dalam hal:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri dan pengunduran dirinya disetujui; atau
 - d. diganti sebelum masa jabatan berakhir.
 - 11) Apabila pejabat Dewan Pengawas diberhentikan atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan pejabat sebelumnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Pemimpin BLU. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan BPJPH secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

7. Unit Pengembangan Usaha

Unit pengembangan usaha merupakan bagian dari BLU yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU. Kepala unit usaha dapat diberikan kewenangan mengelola Rekening Operasioanal BLU tersendiri untuk menampung pendapatan dan untuk keperluan pengeluaran sesuai Praktik Bisnis yang Sehat.

Kepala Unit Pengembangan Usaha harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja manajerial yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BLU. Pelaksanaan kegiatan pada unit usaha harus memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan. Unit pengembangan usaha terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretaris;
3. Ketua Divisi Pengembangan Layanan Unit Usaha Dalam Negeri
4. Ketua Divisi Pengembangan Layanan Unit Usaha Luar Negeri





BAB II

KINERJA BPJPH TAHUN 2022, DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2023

A. GAMBARAN KONDISI BPJPH

1. Kondisi Internal BPJPH

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan Produk Halal (JPH) hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melaksanakan layanan meliputi:

1. Layanan sertifikasi Halal;
2. Layanan registrasi sertifikasi halal luar negeri;
3. Layanan registrasi auditor halal;
4. Layanan akreditasi LPH;
5. Layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal;
6. Layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal; dan
7. Layanan penunjang.

Untuk menjalankan layanan-layanan tersebut di atas, BPJPH mempunyai kekuatan antara lain sebagai berikut:

1. BPJPH adalah satu-satunya badan yang memiliki wewenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal di Indonesia;
2. Kewajiban bersertifikat halal bagi seluruh produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan;
3. Proses sertifikasi BPJPH memiliki tenggat waktu yang lebih pasti;
4. Proses sertifikasi lebih transparan baik prosedur maupun tarif yang ditetapkan;
5. Sertifikasi BPJPH diakui secara internasional;
6. Sertifikasi halal oleh BPJPH memiliki masa berlaku yang lebih lama;

7. Kementerian Agama memiliki kantor wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai kemudahan pelayanan karena adanya satuan tugas daerah yang membantu proses sertifikasi pelaku usaha di daerah;
8. Sudah siapnya aplikasi layanan halal yang dapat diakses masyarakat luas yang dapat mempercepat proses permohonan sertifikat halal;
9. Kerja sama dengan Kementerian, Lembaga Terkait, Ormas, Universitas dan yayasan dalam rangka peningkatan layanan; dan
10. BPJPH telah menyusun standar guna pelaksanaan jaminan produk halal. Standar dimaksud pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Progress Penyusunan Standar Jaminan Produk Halal Tahun 2022

NO.	JUDUL	PROGRES	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sistem Jaminan Produk halal	Sudah ditanda tangani Keputusan Kepala BPJPH No. 57 TAHUN 2021 tentang Kriteria Sistem jaminan Produk Halal	Sosialisasi ke K/L	
2.	Pedoman Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Produk Makanan	Telah dilakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga, termasuk MUI. Telah dilakukan reviu dengan K/L termasuk MUI pada bulan Maret 2021	Mengajukan usulan pengesahan sebagai Keputusan Ka BPJPH	Turunan SJPH
3.	Pedoman Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Produk Minuman	Telah dilakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga, termasuk MUI. Telah dilakukan reviu dengan K/L termasuk MUI pada bulan Maret 2021	Mengajukan usulan pengesahan sebagai Keputusan Ka BPJPH	Turunan SJPH
4	Manual SJPH Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare)	Sudah ditanda tangani Keputusan Kepala BPJPH No. 57 TAHUN 2022 ttg Manual SJPH Untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Sosialisasi ke K/L	
5	Verikasi dan Inspeksi PPH	Dalam pembahasan dengan BSN dan K/L lain	Pembahasan pada tahap final untuk diteruskan proses penerbitan	Turunan SJPH
6	Manual RPH Untuk Ruminansia	Dalam pembahasan dengan BSN dan K/L lain	Pembahasan pada tahap final untuk diteruskan proses penerbitan	Turunan SJPH
7	Pedoman Katering/Jasa Boga dan Restoran	Draft Pedoman Katering/Jasa Boga dan Restoran	Pembahasan internal dan pembahasan antar K/L	Turunan SJPH
8	Pedoman Persyaratan Sertifikasi Produk Obat	Draft Pedoman Persyaratan Sertifikasi Produk Obat	Pembahasan internal dan pembahasan antar K/L	Turunan SJPH
9	Pedoman Persyaratan Sertifikasi Produk Kosmetik	Draft Pedoman Persyaratan Sertifikasi Produk Kosmetik	Pembahasan internal dan pembahasan antar K/L	Turunan SJPH
10	Pedoman Persyaratan Sertifikasi Barang Gunaan	Draft Pedoman Persyaratan Sertifikasi Barang Gunaan	Pembahasan internal dan pembahasan antar K/L	Turunan SJPH
11	Pedoman Penentuan Jenis Produk Wajib Uji Laboratorium	Draft Pedoman Penentuan Jenis Produk Wajib Uji Laboratorium	Pembahasan internal dan pembahasan antar K/L	Turunan SJPH
12	Pedoman Penentuan Contoh Untuk Pengujian Kehalalan Produk	Draft Pedoman Penentuan Contoh Untuk Pengujian Kehalalan Produk	Pembahasan internal dan pembahasan antar K/L	Turunan SJPH
13	Standar Lab Halal	Draft Standar Lab Halal	Pembahasan internal dan pembahasan antar K/L	Turunan SJPH

Diantara banyaknya kekuatan yang dimiliki BPJPH, masih terdapat kelemahan yang menjadi kendala permasalahan layanan, yaitu:

1. Belum tersedianya kantor perwakilan daerah dalam bentuk struktur vertikal Kementerian Agama;
2. Sebagian peraturan dari turunan UU dan PP penyelenggaraan JPH masih dalam proses penyelesaian;
3. Masih terbatasnya jumlah LPH yang melayani pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dan belum tersebar di 34 provinsi;
4. Masih terbatasnya jumlah pendamping PPH yang melayani sertifikasi halal bagi UMK;
5. Belum ditetapkan Standar Metode Uji Halal;
6. Belum ditetapkan Pedoman Auditor Halal Melakukan Audit Halal;
7. Belum ditetapkan Format Laporan Auditor Halal;
8. Belum ditetapkan Standar Akreditasi LPH;
9. Belum ditetapkan Standar Kerja Sama Dalam Negeri; dan
10. Masih terbatasnya jumlah LHLN yang bekerjasama dengan BPJPH.

a. Keuangan

BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menggunakan dana APBN. Pada Tahun 2018 total yang dialokasikan APBN sebesar Rp75.951.803.000,- Kemudian alokasi APBN tahun 2019 sebesar Rp201.416.463.000,- dengan rincian RM sebesar Rp52.554.744.000 dan SBSN sebesar Rp148.861.719.000,-. Pada tahun 2020 alokasi APBN sebesar Rp48.921.035.000,- dan luncturan SBSN dari tahun 2019 sebesar Rp83.816.832.000,-, kemudian alokasi 2021 sebesar Rp68.723.713.000,- sedangkan untuk alokasi tahun 2022 sebesar Rp188.802.163.000,- sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2. Anggaran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2018 s.d. 2022 (dalam ribuan)

	Jenis Belanja	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Belanja Pegawai	11.212.866	14.995.391	13.745.872	15.312.196	18.729.580
2.	Belanja Barang/jasa	41.906.991	30.179.881	32.597.181	45.137.468	166.712.561
3.	Belanja Modal	22.831.946	156.241.191	86.394.814	8.274.049	3.360.022
Total Belanja		75.951.803	201.416.463	132.737.867	68.723.713	188.802.163
Pendapatan						
1.	RM	75.951.803	52.554.744	48.921.035	68.573.713	180.002.163
2.	PNBP				150.000	8.800.000
3.	Pinjaman/Hibah LN					
4.	Pinjaman/Hibah DN					
5.	Hibah Langsung					
6.	SBSN PBS		148.861.719	83.816.832		
	Total	75.951.803	201.416.463	132.737.867	68.723.713	188.802.163

Pada tahun 2021, BPJPH memperoleh penerimaan dari layanan sertifikasi halal sebesar Rp14.000.000,- hal ini dikarenakan BPJPH telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU,

1. Sumber pendapatan berupa PNBP dari tarif layanan yang diberlakukan;
2. Telah ditetapkan keputusan Kepala Badan tentang penetapan tarif layanan BLU BPJPH;
3. Telah ditetapkan peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH;
4. Telah memiliki Rekening Dana Kelolaan, Rekening Operasional Penerimaan, dan Rekening Operasional Pengeluaran pada Bank yang telah ditetapkan; dan
5. Telah memiliki sistem pengelolaan keuangan BLU.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki BPJPH dalam pengelolaan keuangan yaitu:

1. Sistem akuntansi BLU belum berjalan secara optimal;
2. Belum memiliki satuan pengendalian internal BLU; dan
3. Selum memiliki unit usaha pengembangan bisnis BPJPH.

b. Organisasi dan Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk menjalankan fungsinya, BPJPH didukung oleh SDM baik dari unsur PNS maupun Non PNS. Sebaran pendidikan SDM yang mendukung kegiatan pelayanan pada BPJPH dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah SDM BPJPH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL	%
		PNS	PPNPN		
1	S3	6	0	6	2,96
2	S2	30	3	33	16,26
3	S1	104	19	123	60,59
4	D4	3	5	8	3,94
5	D3	3	0	3	1,48
6	SMA	4	25	29	14,29
7	SMP	0	1	1	0,49
JUMLAH		150	53	203	100,00

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM, dilakukan pengembangan SDM yang diarahkan untuk mengikuti rencana perkembangan BPJPH. Pelaksanaan penambahan pegawai maupun peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan antara lain:

1. Keragaman kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang berpengalaman pada satuan kerja sebelumnya;
2. Telah memiliki persetujuan prinsip pembentukan jabatan fungsional pengawas JPH;

3. Memiliki pegawai yang kompeten dalam pengawasan halal melalui pendidikan dan pelatihan pengawas JPH;
4. Memiliki pegawai yang kompeten dalam pengelolaan keuangan BLU melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Memiliki ASN yang berkualifikasi pendidikan Sains dan Teknologi yang direkrut melalui proses CAT BKN; dan
6. Telah menerapkan sistem rekrutment ASN yang transparan melalui CAT BKN.

Kelemahan pada pengembangan SDM yang menjadi faktor kendala dalam layanan yaitu:

1. Belum memiliki SDM profesional dalam pengelolaan usaha berbasis BLU, *marketing*, dan *public relation*;
2. Masih minimnya jumlah tenaga pelayanan sertifikasi halal;
3. Masih terdapat SDM yang bekerja melebihi tugasnya;
4. Belum adanya SPI dan tenaga fungsional untuk memenuhi kebutuhan Satker yang menerapkan PPK BLU; dan
5. Budaya kerja ASN yang cenderung administrator.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH telah memiliki Gedung Pusat Layanan Halal. Lokasi pembangunan gedung berada di Jl. Raya Pondok Gede, Makasar, Jakarta Timur. Saat ini, gedung sudah difungsikan sebagai gedung operasional layanan halal.

Untuk menunjang layanan, gedung BPJPH telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana utama maupun penunjang, dengan luas sebesar 6.142 m². Beberapa sarana dan prasarana utama diantaranya adalah gedung, laboratorium, dan lahan parkir. Selain itu, terdapat gedung eksisting yang dipertahankan yang nantinya akan digunakan sebagai bangunan penunjang, kemudian didalam site terdapat rumah daya yang akan menunjang seluruh kelistrikan baik gedung utama maupun gedung penunjang.

Gedung terdiri dari 4 (empat) lantai dan 1 (satu) *basement* yang dapat menampung 350 pegawai. Sarana dan prasarana penunjang Gedung BPJPH terdiri dari ruang layanan konsultasi, ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan/aula, ruang kelas, serta klinik dan ruang laktasi.

Sedangkan laboratorium memberikan pelayanan antara lain: (1) bimbingan teknis, (2) jasa pelayanan kompetensi penelitian, (3) penggunaan fasilitas laboratorium, dan (4) layanan kunjungan. Disamping itu, laboratorium memiliki fungsi sebagai standar pengujian kehalalan produk, sarana untuk pengembangan metode uji kehalalan produk, sarana pengujian hasil pengawasan JPH, sarana penelitian produk halal, dan sarana edukasi pengujian produk halal.

Selanjutnya, untuk fasilitas parkir gedung ini disediakan 2 (dua) jenis, yaitu parkir di luar bangunan dan parkir *basement*. Luas lahan lahan parkir dapat menampung 56 kendaraan roda empat dan 72 kendaraan roda dua. Ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
1	Tanah	m ²	6.132
2	Bangunan	m ²	
	Gedung Laboratorium Halal	m ²	1.358
	Gedung Pusat Layanan Halal	m ²	9.182
	Power House	m ²	119
3	Kendaraan Bermotor		
	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	6
	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	11
	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	19
4	Peralatan dan Mesin		
4.1	Data Center		
	Server Nutanix	Node	9
	Server Backup HP Storage	Unit	1
	Firewall Checkpoint	Unit	1
	WAF F5	Unit	1
	Switch Cisco Nexus	Unit	1
	Rack Server APC	Unit	1
	UPS APC	Unit	1
4.2	Peralatan Laboratorium		
	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik Lainnya	Unit	1
	Centrifuge (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	2
	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1
	Laboratory Acid Storage Cupboard	Unit	11
	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	13
	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Tabung Gas (Alat Laboratorium)	Unit	12
	Thermohyrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	Unit	4
	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	1
	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Unit	1.233
4.3	Perangkat TIK		
	PC Unit	Unit	164
	Notebook	Unit	134
	Laptop	Unit	52
	Smart Ipad	Unit	5
	Printer	Unit	152
	Scanner ScanJET	Unit	53
	IP Telephone	Unit	40
	Harddisk External SSD	Unit	60
	Harddisk External (Wireless)	Unit	4
4.4	Perangkat Non TIK		
	Air Conditioner	Unit	230

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Televisi	Unit	12
	Kamera Digital	Unit	9
	PABX Server	Set	3
	Handy Talkie	Unit	6
	Mesin Tik Elektronik	Unit	3
	LCD Projector	Unit	11
	Mesin Fotocopy	Unit	3
	Mesin Absensi	Unit	5
	Laser Pointer	Unit	4
	Paper Shredder	Unit	10
	Tabung Pemadam	Unit	38
	Lift	Unit	3
5	Mebeulair		
	Lemari Besi/Metal	Unit	52
	Lemari Kayu	Unit	69
	Filing Cabinet	Unit	55
	Brangkas	Unit	5
	Meja Kerja	Unit	200
	Kursi Kerja	Unit	1.138
	Meja Rapat	Unit	43
	Pot Bunga	Unit	112
	Meja Tamu	Set	19
	Kasur	Unit	7
	Papan Tulis	Unit	16
	Dipan	Unit	19
	Sice	Unit	4
	Meja Komputer	Unit	12
	Sofa	Unit	48
	Meja Resepsionis	Unit	10
	Box Penyimpan Tabung Pemadam	Unit	12
	Buffet	Unit	322
	Meja Makan	Unit	5

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum BPJPH, sebagaimana data tersebut di atas, maka dalam hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain:

Kekuatan:

1. Aplikasi Sistem Informasi Halal (Sihalal) sudah online, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha kapan saja dan dimana saja;
2. Telah ditetapkan pengelola laboratorium halal; dan
3. Setiap pegawai telah memiliki perangkat kerja yang lengkap, dilengkapi dengan internet.

Kelemahan:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menghasilkan penerimaan BLU BPJPH;
2. Laboratorium belum terakreditasi; dan
3. Ruang utama laboratorium dengan ruang tunggu pelayanan masih terpisah.

2. Kondisi Eksternal BPJPH

Berdasarkan *Halal Marketing Report 2021* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, perdagangan internasional produk industri halal Indonesia memiliki potensi hingga 5,1 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 71,4 triliun. Hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku industri halal Indonesia untuk merebut pasar halal dunia.

Hasil survei *State of Global Islamic Economy Report* dari Dinar Standard, menyebutkan bahwa pada tahun 2019 jumlah masyarakat muslim dunia mencapai sekitar 1,9 miliar orang dengan *total spending* untuk produk halal mencapai USD 2,02 triliun. Angka tersebut diproyeksikan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat. Sebagai hasil edukasi yang luas dan berjamaah, hasil survei tahun ini menunjukkan peningkatan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, yakni meningkat dari 16,3 persen menjadi 20,1 persen.

Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Muslim membentuk 87,2% dari total populasi negara itu. Berdasarkan Report Indonesia Halal merupakan negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, yakni sekitar 87,2% dari total penduduk. Dalam survei *Pew Research*, 98% orang Indonesia yang disurvei percaya bahwa agama sangat penting, dengan 2% sisanya percaya bahwa itu agak penting. Sejak tahun 2006, angka ini hanya bertambah. Pengeluaran konsumen untuk makanan halal sudah menjadi yang tertinggi di dunia. Sektor gaya hidup seperti pakaian sederhana memiliki potensi yang signifikan, terutama karena Indonesia sudah menjadi produsen pakaian yang sukses secara umum dan tujuan wisata yang populer. Pertumbuhan Pendapatan Meski Bank Dunia menurunkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan rendah menengah karena pendapatan nasional bruto per kapita turun dari US\$ 4.050 pada 2019 menjadi US\$ 3.870 pada 2020. Status pendapatan menengah ke atas dalam satu sampai dua tahun, jika pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai 5-6% dan jumlah penduduk naik 1,2% per tahun. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifik percaya bahwa Indonesia dapat tumbuh mendekati 5% pada tahun 2022, terutama dengan program peluncuran vaksin yang sukses. Pada 2019, setengah dari keranjang konsumsi konsumen Indonesia terdiri dari makanan.

Seiring pertumbuhan pendapatan, kategori non-makanan akan membuat proporsi yang lebih besar dari keranjang ini. Peningkatan pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga dapat dikaitkan dengan urbanisasi yang lebih besar. Pada kategori makanan, proporsi pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi juga diperkirakan akan meningkat pada tahun 2030. Hal ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang membuat orang lebih banyak makan di luar dan mencari makanan yang lebih praktis dan dikemas. Hal ini juga terkait dengan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi. Proliferasi media sosial yang tinggi 61,8% populasi aktif di media sosial. Ini

meningkat 6,3% antara Januari 2020 dan Januari 2021. 36% waktu yang dihabiskan di internet dihabiskan di media sosial. 65,1% pengguna menggunakan media sosial sebagai sumber utama mereka untuk meneliti merek. Mereka yang berusia 18 hingga 34 tahun merupakan demografi terbesar dari mereka yang ada di media sosial. Ini adalah 4 platform media sosial teratas dan persentase pengguna internet antara 16-64 yang telah menggunakan masing-masing platform dalam sebulan terakhir yaitu:

YouTube: 93.8%	WhatsApp: 87.7%	Instagram: 86.6%	Facebook: 85.5%
----------------	-----------------	------------------	-----------------

Mengingat tingkat *platform* media sosial yang tinggi di Indonesia, saluran ini menawarkan potensi pertumbuhan yang sangat besar bagi banyak perusahaan konsumen. Banyak konsumen yang sudah berada di media sosial tetapi tidak melihatnya sebagai tempat untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu, bisnis harus fokus pada membangun kehadiran mereka, membangun kredibilitas mereka, dan meningkatkan upaya pemasaran mereka pada platform ini untuk mendorong minat dan penjualan yang lebih besar.

Populasi *tech-savvy* Indonesia mendorong ekonomi internetnya tumbuh lebih dari 10% hingga mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar \$44 miliar pada tahun 2020, terbesar di Asia Tenggara. Ekonomi digital menyumbang 4% dari PDB negara pada tahun 2020.96 Sekitar 73,7%97 populasi memiliki akses ke internet, yang secara signifikan melebihi tingkat global sebesar 59,5%. Ada 345,3 juta koneksi seluler, yang berarti 1,2 koneksi seluler per orang di Indonesia. Sekitar 87,1% pengguna telah melakukan pembelian secara online. Milenial dan Gen-Z merupakan 53% dari populasi Indonesia. Hal ini turut berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi digital di tanah air.

Belum banyaknya produk yang bersertifikat halal menjadi salah satu pemicu produk Indonesia tidak dipasarkan di kawasan negara-negara muslim maupun pasar global yang mengonsumsi produk halal. Berdasarkan data MUI, jumlah produk obat, kosmetik, produk suplemen makanan, produk makanan dan minuman yang berjumlah 59.971 pada tahun 2014, hanya 67,75% yang telah bersertifikat halal. Artinya masih banyak produk yang beredar di masyarakat yang dikonsumsi masyarakat muslim tidak memiliki kejelasan status halal. Permasalahan sertifikasi halal masih menjadi dilema bagi pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro atau UMK.

Masalah utama bagi pelaku usaha kelompok ini adalah biaya sertifikasi halal yang dinilai memberatkan. Untuk itu, BPJPH memberlakukan tarif yang memiliki rentang minimal dan maksimal, juga menerapkan tarif nol rupiah dengan rentang omzet khusus bagi usaha mikro dan kecil melalui dana APBN maupun bantuan bergulir dari pemerintah pusat, daerah atau perusahaan swasta yang difungsikan untuk membantu para pegiat usaha mikro kecil.

Kemudian, proses pemeriksaan halal menjadi krusial apabila bahan baku produk olahan diperoleh dari luar negeri. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri. Proses ini diperlukan untuk memastikan setiap informasi produk yang masuk ke Indonesia memiliki jaminan halal atau ada informasi yang menunjukkan produk tersebut halal atau tidak halal.

Selanjutnya adalah regulasi turunan dari UU Nomor 33 tahun 2014 juga menjadi sangat penting yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Harmonisasi dan penyesuaian regulasi yang berlaku pada masing-masing Kementerian/ Lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan tidak tumpang tindih dengan regulasi pemerintah lainnya karena ruang lingkup yang diatur dalam UU JPH mencakup Pemerintah, MUI, LPH, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain itu, BPJPH juga diharapkan mempunyai struktur ke daerah/provinsi agar fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan dapat berjalan optimal. Adapun terkait infrastuktur LPH selama ini masih terpusat pada peran LPPOM MUI. Diharapkan tahun 2022 BPJPH dapat memfungsikan peran Perguruan Tinggi dan Ormas Islam lainnya sebagai LPH.

a. Undang-undang

Keberadaan BPJPH sebagai Badan Layanan Umum yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki payung hukum sebagai berikut:

1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; dan
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan adanya Undang-Undang Cipta kerja telah mengubah proses bisnis BPJPH dan membuat sejumlah perubahan signifikan pada Undang-Undang JPH. Di antaranya soal kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pelibatan ormas Islam berbadan hukum dalam proses sertifikasi halal, pemangkasan jangka waktu pengajuan dan proses sertifikasi halal, serta perubahan sejumlah sanksi terkait regulasi tersebut.

Untuk itu, dengan disahkannya Undang-Undang ada beberapa revisi dalam regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan bentuk peraturan pemerintah dan pengaturan yang lebih teknis yang dituangkan dalam peraturan Menteri dan Peraturan Unit Eselon I pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Kementerian lain yang terkait yang mendukung dalam proses Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan dalam mencapai target yang sudah dicanangkan. BPJPH dalam melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mengacu pada Kebijakan Pemerintah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pengawas JPH;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi LPH;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang kerjasama internasional JPH;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
19. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 50/PB/2007 tentang petunjuk Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Satker Instansi pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan keuangan BLU;
20. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 67/PB/2007 tentang Tatacara Pengintegrasian laporan Keuangan BLU ke dalam laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

21. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2012, tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
22. Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
23. Keputusan Kepala BPJPH Nomor Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria SJPH;
24. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 135 Tahun 2021 BPJPH tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal;
25. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi Pernyataan Kehalalan Produk; dan
26. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Namun demikian masih diperlukan beberapa kebijakan yang diperlukan untuk mendukung kinerja BPJPH diantaranya sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai SOTK perwakilan BPJPH di daerah. BPJPH perlu melakukan sosialisasi terkait JPH secara merata kepada masyarakat, pelaku usaha, Kemenag tingkat daerah, dinas urusan koperasi usaha kecil, mikro dan menengah serta instansi pemda lainnya. Selain itu, juga perlu mempeluas cakupan dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat daerah. Untuk itu, BPJPH perlu membuat regulasi terkait struktur, tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH di tingkat daerah secara jelas dan rinci;
2. Regulasi standar kompetensi pengawas juga diperlukan. Pengawas pada akhirnya harus berpedoman pada syarat kompetensi keahlian, kode etik, dan standar penagawasan yang disusun oleh BPJPH yang bekerjasama dengan Kementerian/Lemabaga Terkait;
3. Regulasi tentang Peredaran Produk dan Alat Kesehatan yang Belum Bersumber dari Bahan Halal;
4. Regulasi tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Standar Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal;
5. Regulasi tentang tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
6. Regulasi tentang tentang Penyelenggaraan pelatihan pengawas JPH;
7. Regulasi tentang tentang Proses Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk; dan
8. Ketentuan tentang pedoman standar-standar di luar perintah regulasi akan tetapi dibutuhkan dalam rangka mendukung kinerja BPJPH.

3. Asumsi Makro

Perkembangan ekonomi global di tahun 2022 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan

vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi.

Di tahun 2022, perekonomian nasional diharapkan kembali bangkit pasca covid-19 yang diperkirakan berada pada kisaran 4,7-5.5% persen. Namun, Gelombang pandemi Covid-19 varian baru kembali muncul. Pandemi covid mulai melandai seiring dengan program vaksinasi dan menurunnya kasus rata-rata harian nasional maupun global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2021 berhasil tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy) atau 1,55% (qtq), melanjutkan pertumbuhan positif sebelumnya dari Triwulan II-2021. Respon cepat Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus varian delta pada awal Triwulan III-2021 dapat memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi nasional.

Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi demand dan supply tetap terjaga. Percepatan realisasi dari hasil refocusing anggaran Program PEN yang mengikuti dinamika pandemi selama Triwulan III-2021 juga telah mendorong konsumsi Pemerintah untuk tumbuh mencapai 0,66% (yoy).

Selanjutnya, situasi pandemi yang mulai terkendali telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 1,03% (yoy) dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga tumbuh sebesar 2,96% (yoy). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh sebesar 3,74% (yoy) sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi dunia usaha.

Pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas global juga mendorong aktivitas perdagangan internasional Indonesia. Ekspor tumbuh sebesar 29,16% (yoy) dan impor tumbuh sebesar 30,11%(yoy) pada Triwulan III-2021. Neraca perdagangan Indonesia juga terus berlanjut mengalami surplus selama 17 bulan berturut-turut, hingga akhir September 2021. Strategi kebijakan Pemerintah selama pandemi dalam menjaga pasokan ekspor kedua komoditas utama, yakni batubara dan CPO, turut memberikan kontribusi positif. Selain itu, terjaganya ketersediaan pasokan dalam negeri juga menjadi kunci menjaga momentum ekspor di tengah kenaikan harga.

Pulihnya berbagai sektor usaha di Triwulan III-2021 juga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Per Agustus 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat menjadi 67,80% dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 6,49%, lebih baik dibandingkan tahun 2020. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar. Selain itu, keyakinan dunia usaha untuk mulai merekrut pegawai juga tercermin dari peningkatan persentase komposisi penduduk bekerja di kegiatan formal sebesar 1,02% (dibandingkan Agustus 2020). Secara umum, upaya pengendalian pandemi telah berhasil menurunkan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 menjadi sebesar 21,32 juta orang di Agustus 2021, lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Secara spasial, mayoritas wilayah di Indonesia melanjutkan pertumbuhan positif pada Triwulan III-2021. Pulau Jawa dan Sumatera sebagai kontributor perekonomian nasional masing-masing mampu tumbuh positif sebesar 3,03% (yoy) dan 3,78% (yoy). Pencapaian ini juga terjadi pada pulau Kalimantan, Sulawesi.

Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2022

No.	Asumsi Makro	RAPBN	APBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0 – 5,5	5,2
2	Laju Inflasi (%)	3	3
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.350	14.350
4	Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%)	6,82	6,8
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	63	63
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	703	703
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1036	1036

(Sumber: Kemenkeu.go.id)

4. Asumsi Mikro

a. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh BPJPH adalah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2008 tentang pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum. Selain itu penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan juga mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Secara umum, kebijakan akuntansi tersebut meliputi prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan BPJPH dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

1. Asumsi Dasar dalam pelaporan meliputi:
 - a. Asumsi kemandirian entitas;
 - b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yang harus dipenuhi agar memiliki kualitas:

- a. Relevan, Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya memiliki:
 - Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
 - Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
 - Tepat waktu
 - Lengkap
 - b. Andal, Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
 - Penyajian Jujur
 - Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
 - Netralitas
 - b. Dapat dibandingkan; dan
 - c. Dapat dipahami.
3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- a. Basis akuntansi;
 - b. Prinsip nilai historis;
 - c. Prinsip realisasi;
 - d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 - e. Prinsip periodisitas;
 - f. Prinsip konsistensi;
 - g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - h. Prinsip penyajian wajar.

b. Kebijakan Pendataan dan Pengukuran

a. Kebijakan Pengakuan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- i terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- ii. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Prinsip pengakuan untuk unsur-unsur utama laporan keuangan entitas pelaporan adalah:

i. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

ii. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

iii. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

iv. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

b. Kebijakan Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

c. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

d. Tarif Layanan BLU BPJPH

Tarif BLU BPJPH Kementerian Agama telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 57/PMK.05/2021 dan Kepala BPJPH melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Penetapan Tarif BLU BPJPH

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Per Sertifikat	300.000 s.d 12.500.000
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler		
	2. Perpanjangan Sertifikat		
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri		
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	4.200.000 s.d. 17.500.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
C	Registrasi Auditor Halal	Per Orang	300.000
D	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.600.000 s.d. 3.800.000
E	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.800.000 s.d. 3.500.000

Tabel 2.7. Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa	Per Sertifikat	
	1. Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (<i>Self Declare</i>)		230.000
	2. Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)		
	Usaha mikro dan kecil		300.000
	Usaha menengah		5.000.000
	Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		12.500.000
	3. Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal		
	Usaha mikro dan kecil		200.000
	Usaha menengah		2.400.000
	Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		5.000.000
	4. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		800.000
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	
	1. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	golongan 1		4.200.000
	golongan 2		13.300.000
	golongan 3		17.500.00000
	2. Perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	golongan 1		3.400.000
	golongan 2		8.200.000
	golongan 3		9.100.000
	3. Reakreditasi level Lembaga Pemeriksa Halal		8.700.000
	4. Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri		17.500.000
	5. <i>Witness</i> (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk)	Sekali dalam masa akreditasi	
	Lembaga Pemeriksa Halal		
	Lembaga Pemeriksa Halal Pratama	Per Orang/hari	3.500.000
	golongan Lembaga Pemeriksa Halal Utama	Per Orang/hari	10.000.000
	Lembaga Halal Luar Negeri	Per Orang/hari	17.500.000
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelatihan Auditor Halal		
	golongan 1		3.000.000
	golongan 2		3.500.000
	golongan 3		3.700.000
2.	Registrasi Auditor Halal		300.000
3.	Pelatihan Penyelia Halal		
	golongan 1		1.600.000
	golongan 2		2.700.000
	golongan 3		3.800.000
D	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal		
1.	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		3.500.000
2.	Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		1.800.000

Tabel 2.8. Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan		
	lahan parkir		
	sepeda motor	per 1 s.d. 6 jam	3.000
	mobil	per 1 s.d. 6 jam	5.000
	ruang pertemuan/aula (kapasitas 150 orang)	per hari (12 jam) per 8 jam	1.950.000 1.500.000
	ruang rapat (kapasitas 20 orang)	Per hari (12 jam) Per 8 jam	390.000 300.000
2	Tarif penggunaan laboratorium		
	bimbingan teknis		
	manajemen pengelolaan laboratorium halal	per orang	500.000
	uji validasi hasil pengukuran	per orang	700.000
	uji pengukuran konsentrasi alkohol pada Produk	per orang	1.000.000
	uji pengukuran kandungan lemak pada Produk	per orang	1.200.000
	uji pengukuran kandungan DNA pada Produk	per orang	1.000.000
	uji pengukuran kandungan protein pada Produk	per orang	1.200.000
	teori dan penerapan PCR	per orang	1.000.000
	teori dan penerapan GCMS	per orang	1.000.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	teori dan penerapan LCMS/MS	per orang	1.000.000
	teori dan penerapan HPLC	per orang	1.000.000
	teori dan penerapan FTIR	per orang	1.000.000
	jasa pelayanan kompetensi penelitian		
	pendampingan proposal penelitian		
	D3	per orang/konsultasi	100.000
	D4/SI	per orang/konsultasi	150.000
	S2	per orang/konsultasi	200.000
	S3	per orang/konsultasi	250.000
	pendampingan operasional penelitian		
	D3	Per orang/penelitian	300.000
	D4	Per orang/penelitian	350.000
	S1	Per orang/penelitian	400.000
	S2	Per orang/penelitian	700.000
	S3	Per orang/penelitian	1.250.000
	penggunaan fasilitas laboratorium		
	analytical balance	per 1 kali penggunaan	55.000
	orbital shaker	per 1 kali penggunaan	27.500
	pipette controler	per 1 kali penggunaan	10.000
	autoclave	per 1 kali penggunaan	245.300
	centrifuge	per 1 kali penggunaan	127.600
	dry block heater	per 1 kali penggunaan	100.000
	freeze-20	per 1 kali penggunaan	55.000
	FTIR Alpha II platinum FT-IR spectrometer with ATR diamond	per sampel	250.000
	fume hood	per hari (maksimal 8 jam/hari)	100.000
	GC-MS with Liquid and headspace autosampler	per sampel	250.000
	GC With FID and head space sampler	per sampel	250.000
	high speed refrigerated micro centrifuge	per sampel	127.600
	homogenizer	per jam	50.000
	hotplate stirrer	per hari (maksimal 8 jam/hari)	25.000
	incubator	per hari (maksimal 8 jam/hari)	50.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	micropestle	per hari (maksimal 8 jam/hari)	15.000
	micropipette premium line	per hari (maksimal 8 jam/hari)	10.000
	micro-volume spectrophotometer	per sampel	100.000
	multi-purpose centrifuge	per 1 kali penggunaan	15.000
	oven	per jam per sampel	10.000
	PCR RT	per 1 kali penggunaan	275.000
	pH meter	per 1 kali penggunaan	44.000
	pipette controller	per 1 kali penggunaan	25.000
	safety cabinet class II type A2	per 1 kali penggunaan	110.000
	semimicro balance	per 1 kali penggunaan	60.000
	thermoshaker for microtubes	per jam	10.000
	thermoShaker for microtubes and PCR plates	per jam	15.000
	ultrasonic bath	per jam	25.000
	vortex	per 1 kali penggunaan	165.000
	water purifier	per liter	10.000
	layanan kunjungan		
	SLTA	per orang/hari	10.000
	D3	per orang/hari	20.000
	D4/SI	per orang/hari	20.000
	S2	per orang/hari	25.000
	S3	per orang/hari	35.000
	Profesi	per orang/hari	25.000
3	Tarif penggunaan kendaraan bermotor		
	mobil (kendaraan roda 4)	per hari	500.000
	minibus/elf	per hari	800.000
	bus	per hari	1.500.000

5. Asumsi Fasilitas Sertifikasi Halal

Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan wujud jaminan dan perlindungan negara dalam kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat muslim sebagai wujud ibadah dalam menjalankan ajaran agamanya harus diberikan perlindungan dan jaminan. Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh

produk yang masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Agar usaha mikro kecil (UMK) dapat memiliki sertifikat halal tanpa dibebankan biaya kewajiban halal maka perlu dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta dalam bentuk fasilitasi. Selain itu, sebelum BLU BPJPH menerima PNBP, perlu adanya dukungan pemerintah melalui APBN agar operasional BPJPH dapat berjalan.

a. Asumsi Volume Pelayanan

Asumsi jumlah layanan tahun 2023 diestimasikan pelayanan BPJPH meningkat, dengan indikator:

1. jumlah pelaku usaha yang mendapatkan perijinan tunggal dari OSS per 31 Desember 2021 sebanyak 37.730 lembaga;
2. penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman akan berakhir pada 17 Oktober 2024; dan
3. penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal bagi produk selain makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minum sudah dimulai sejak 17 Oktober 2021.

Berdasarkan hal tersebut, maka asumsi volume layanan sertifikasi halal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9. Asumsi Volume Layanan Tahun 2023

No.	Jenis Layanan	Satuan	Target
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa		
	Sertifikat Halal Proses Reguler	Sertifikat	22.000
	Perpanjangan Sertifikat	Sertifikat	12.011
	Registrasi sertifikat halal luar negeri	Sertifikat	50
	Sertifikat Halal UMK	Sertifikat	164.000
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	Akreditasi LPH	Lembaga	24
	Perpanjangan Akreditasi LPH	Lembaga	-
	Reakreditasi Level LPH	Lembaga	5
	Akreditasi LHLN	Lembaga	-
	Witness LPH Pratama	Lembaga	6
	Witness LPH Utama	Lembaga	5
	Witness LHLN	Lembaga	-
C	Registrasi Auditor Halal	Orang	90
D	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Orang	500
E	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Orang	500

b. Asumsi Total Pendapatan

Sumber pendapatan BLU BPJPH diproyeksikan berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni. Pendapatan BPJPH tahun 2023 bersumber dari BLU direncanakan sebesar Rp12.037.718.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10. Asumsi Total Pendapatan Tahun 2023

NO.	Jenis Layanan	Satuan	Target	Tarif (Rp)	Total (Rp)
1	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa				10.942.200.000
	1. Sertifikat Halal Proses Regular	Sertifikat	22.000	200.000	4.400.000.000
	2. Perpanjangan Sertifikat	Sertifikat	12.011	200.000	2.402.200.000
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri	Sertifikat	50	800.000	40.000.000
	4. Sertifikat Halal UMK	Sertifikat	164.000	25.000	4.100.000.000
2	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal				215.300.000
	1. Akreditasi LPH	Lembaga	24	4.200.000	100.800.000
	2. Perpanjangan Akreditasi LPH	Lembaga	-	3.400.000	0
	3. Reakreditasi Level LPH	Lembaga	5	8.700.000	43.500.000
	4. Akreditasi LHLN	Lembaga	-	17.500.000	0
	5. Witness LPH Pratama	Lembaga	6	3.500.000	21.000.000
	6. Witness LPH Utama	Lembaga	5	10.000.000	50.000.000
	7. Witness LHLN	Lembaga	-	17.500.000	0
3	Registrasi Auditor Halal	Orang	90	300.000	27.000.000
4	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Orang	500	500.000	250.000.000
5	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Orang	500	500.000	250.000.000
6	Layanan Penunjang	Layanan	1	353.218.000	353.218.000
	Total				12.037.718.000

c. Asumsi Rencana Biaya

Rencana Biaya BPJPH tahun 2023 sebesar Rp 336.599.809.000 ,- yang akan digunakan untuk mendukung non operasional dan operasional layanan BPJPH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11. Asumsi Rencana Biaya BPJPH Tahun 2023

Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
A. APBN/RM	
1. Belanja Pegawai	19.417.726.000
2. Belanja Barang	301.483.105.000
3. Belanja Modal	3.661.260.000
B. PNB BLU	
1. Belanja Pegawai	
2. Belanja Barang	12.037.718.000
3. Belanja Modal	
TOTAL RENCANA BIAYA	336.599.809.000

B. RENCANA KINERJA LAYANAN BLU

1. Pencapaian Kinerja

Tujuan BPJPH dalam upaya mencapai visi dan misi BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi & penilaian halal Jaminan Produk Halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan keterjaminan kehalalan produk yang beredar, melalui pembinaan dan pengawasan JPH;
3. Memperluas jejaring kerjasama JPH dan ketersediaan standar jaminan produk halal, serta ketersediaan LPH yang akreditasi;
4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

Kemudian Sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian BPJPH adalah “meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama” sedangkan sasaran program yang ingin dicapai BPJPH dikelompokkan dalam tiga perspektif, yakni perspektif *stakeholder/customer* yang merupakan *goals* besar yang dihasilkan BPJPH, perspektif *Internal Process* yang merupakan sasaran-sasaran strategis yang secara vertikal untuk memberikan kontribusi kepada BPJPH guna terpenuhinya ekspektasi *stakeholders/Customers*. Terakhir adalah perspektif *Learning and Growth* yang merupakan sasaran-sasaran yang secara horisontal atau *cross cutting* berkontribusi mendukung pencapaian.

Dalam mencapai tujuannya di tahun 2021, 2022 dan, BPJPH memiliki realisasi dan proyeksi capaian kinerja sebagai berikut:

a. Pencapaian Kinerja 2021

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	63,00	65,19%	108,65
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00	100%	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00	100%	100
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00	76,45%	76,45
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85,55	84,92%	106,15%
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	90,82	78,89	101,14
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	87,86	72,82	104,03
		d. Nilai Maturitas SPIP	4,28	2,04	68
		e. Indeks Profesionalitas ASN	75,73	76,77	101,01

Tabel 2.13. Capaian Kinerja Tahun 2021 Selaku BLU

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendapatan PNBP BLU yang optimal	Realisasi pendapatan BLU Tahun 2021	Rp8.839.676.000	Rp45.500.000	0,51
2.	Pelayanan Sertifikasi Halal	Penerbitan Sertifikasi Halal Tahun 2021	21.994 Sertifikat	16.297 Sertifikat	74,10
3.	Penyediaan dan Peningkatan kualitas	Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat Tahun 2021	300 Orang	116 orang	38,67
4.	Pelaksana Jaminan Produk Halal	Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat Tahun 2021	300 Orang	365 orang	121,67
5.		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi Tahun 2021	3 Lembaga	3 Lembaga	100
6.	Peningkatan Kemitraan Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH)	Realisasi Kontrak Kerjasama tahun 2021	30 Kontrak Kerjasama	34 Kontrak Kerjasama	113,33
7.	Peningkatan Mitra/ Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) yang memiliki Kompetensi JPH	Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH) tahun 2021	5 Dokumen Standar	12 Dokumen Standar	240
8.	Inovasi Layanan	Inovasi Layanan Publik	80%	90%	112,5

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
9.	Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil Monev Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	70%	50%	71,43
10.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	60 %	75%	125,00

b. Proyeksi Pencapaian Kinerja 2022

Tabel 2.14. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Proyeksi Capaian Akhir Tahun
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	63,00	63,00
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00	100,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00	100,00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00	100,00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85,55	85,55
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	90,82	90,82
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	87,86	87,86
		d. Nilai Maturitas SPIP	4,28	4,28
		e. Indeks Profesionalitas ASN	75,73	75,73

Tabel 2.15. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022 Selaku BLU

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Proyeksi Capaian Akhir Tahun
1.	Pendapatan PNBPN BLU yang optimal	Realisasi pendapatan BLU	Rp8.800.000.000,-
2.	Pelayanan Sertifikasi Halal	Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal	32.970 Sertifikat
3.	Penyediaan dan Peningkatan kualitas Pelaksana Jaminan Produk Halal	Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat	60 Orang
4.		Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat	450 Orang
5.		Jumlah Pendamping Proses Produk Halal yang bersertifikat	525 orang
6.		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	9 Lembaga

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Proyeksi Capaian Akhir Tahun
7.	Peningkatan Kemitraan Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH)	Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	16 Kontrak Kerjasama
8	Peningkatan Mitra/ Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) yang memiliki Kompetensi JPH	Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH)	9 Dokumen Standar
9	Inovasi Layanan	Persentase Inovasi Layanan Publik	100%
10	Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil Monev Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	90%
11.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80%

c. Proyeksi Pencapaian Kinerja 2023

Berdasarkan realisasi dan evaluasi kinerja BLU tahun 2021, adapun target kinerja BPJPH direncanakan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16. Target Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	66,00
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	88,36
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	91,49
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	90,21
		d. Nilai Maturitas SPIP	4,57
		e. Indeks Profesionalitas ASN	77,27

Tabel 2.17. Target Kinerja Tahun 2023 Selaku BLU

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Target Tahunan
1.	Pendapatan PNBP BLU yang optimal	Realisasi pendapatan BLU	Rp12.037.718.000
2.	Pelayanan Sertifikasi Halal	Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal	1.008.500 Sertifikat
3.	Penyediaan dan Peningkatan kualitas Pelaksana Jaminan Produk Halal	Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat	150 Orang
4.		Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat	350 Orang
5.		Jumlah Pendamping Proses Produk Halal yang bersertifikat	34.500 Orang
6.		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	24 Lembaga
7.	Peningkatan Kemitraan Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH)	Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	20 Kontrak Kerjasama
8.	Peningkatan Mitra/ Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) yang memiliki Kompetensi JPH	Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH)	12 Dokumen Standar
9.	Inovasi Layanan	Persentase Inovasi Layanan Publik	100%
10.	Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil Monev Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	90%
11.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80%

C. RENCANA KINERJA KEUANGAN

1. Rincian Pendapatan Unit Kerja

Ditahun 2021, pendapatan BPJPH terealisasi sebesar Rp45.000.000,- yang berasal dari tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa. Realisasi ini masih jauh dari target karena tarif layanan baru ditetapkan pada bulan Juni 2021, sehingga BPJPH masih belum optimal dalam memperoleh pendapatan. Namun demikian, BPJPH optimis di tahun 2022 tarif layanan dapat optimal diperoleh sebesar Rp8.800.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2021 dan 2022

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2021		TA 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
025.12 025.12.DC 2105	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 sertifikasi halal untuk barang dan jasa 1.2 registrasi SHLN 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	150.000.000	45.000.000	7.775.000.000 7.767.000.000 8.000.000
	Total Pendapatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	150.000.000	45.000.000	7.775.000.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 Pelatihan auditor halal dan penyelia halal 1.2 Sertifikasi kompetensi auditor ha- lal dan penyelia halal 1.3 Registrasi Auditor Halal 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya			673.000.000 552.000.000 106.000.000 15.000.000
	Total Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal			673.000.000

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2021		TA 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 penerbitan surat keterangan lembaga pemeriksa halal 1.2 penerbitan sertifikat keterangan lembaga pemeriksa halal 1.3 akreditasi lembaga pemeriksa halal 1.4 akreditasi LHLN 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya			350.000.000 262.500.000 87.500.000
	Total Pendapatan Kerjasama dan Standardisasi Halal			350.000.000
025.12.WA 2111	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendukung 1.1 sewa gedung dan bangunan 1.2 sewa laboratorium 1.3 data mikro 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya			2.000.000 2.000.000
	Total Pendapatan Dukungan Manajemen			2.000.000
Total Pendapatan Blu		150.000.000	45.000.000	8.800.000.000

Sedangkan ditahun 2023, BPJPH memproyeksikan pendapatan terdapat pada 4 (empat) unit kerja. Total target pendapatan dari Pusat Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi halal di tahun 2023 adalah sebesar Rp10.942.200.000,-. Sedangkan pendapatan dari Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebesar Rp527.000.000,-. Sedangkan pendapatan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal sebesar Rp215.300.000,-. Selanjutnya, untuk pendapatan Sekretariat sebesar Rp353.218.000,-. Adapun rincian pendapatan per unit kerja disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.19. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2023

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2023 Target (Rp)
025.12 025.12.DC 2105	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 sertifikasi halal untuk barang dan jasa 1.2 registrasi SHLN 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	10.902.200.000 40.000.000
	Total Pendapatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	10.942.200.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 Pelatihan auditor halal dan penyelia halal 1.2 Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal 1.3 Registrasi Auditor Halal 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	250.000.000 250.000.000 27.000.000
	Total Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	527.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 penerbitan surat keterangan lembaga pemeriksa halal 1.2 penerbitan sertifikat keterangan lembaga pemeriksa halal 1.3 akreditasi lembaga pemeriksa halal 1.4 kerjasama 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	215.300.000
	Total Pendapatan Kerjasama dan Standardisasi Halal	215.300.000

Kode	Uraian	TA 2021			TA 2022	
		Volume Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi/ (Rp)	Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal				16 dokumen	3.171.532.000
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal				16 dokumen	3.171.532.000
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal					
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi					
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen					
2111.EBA.962	Layanan Umum					
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran					
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal					
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal					
JUMLAH			150.000.000	45.000.000		8.800.000.000

Tabel 2.21. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2023

Kode	Uraian	TA 2023	
		Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama		12.037.718.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal		3.450.000.000
2105.PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK		
2105.PDC.002	Sertifikat Halal UMK	15.000 Sertifikat	3.450.000.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi		
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	6500 Lembaga/ stakeholder	4.521.061.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal		4.066.657.000
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal		
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal		
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	10 Lembaga	4.066.657.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen		
2111.EBA.962	Layanan Umum		
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran		
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal		
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		
JUMLAH			12.037.718.000

4. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.22. Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian		Realisasi/ Prognosa TA 2022 (Rp)	TA 2023 (Rp)
I.	PENDAPATAN BLU	8.800.000.000	12.037.718.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum		
	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Sertifikasi Halal	8.800.000.000	12.037.718.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	183.747.016.000	332.938.549.000
	A. BELANJA BARANG BLU	8.019.976.000	12.037.718.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU		
	2. Belanja Barang BLU		
	3. Belanja Jasa BLU		
	4. Belanja Pemeliharaan BLU		
	5. Belanja Perjalanan BLU		
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	8.019.976.000	12.037.718.000
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/(diluar belanja modal)	175.727.040.000	320.900.831.000
	1. Belanja Pegawai	14.231.887.000	19.417.726.000
	2. Belanja Barang	161.495.153.000	313.520.823.000
III.	BELANJA MODAL	5.055.147.000	3.661.260.000
	A. Belanja Modal BLU	780.024.000	0
	B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/..	4.275.123.000	3.661.260.000
IV.	Surplus/(Defisit)	-174.947.016.000	-320.900.831.000
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	14.000.000.000	14.000.000.000
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/	-160.947.016.000	-306.900.831.000
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/	180.002.163.000	324.562.091.000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/	19.055.147.000	17.661.260.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN	188.802.163.000	336.599.809.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA	188.802.163.000	336.599.809.000

5. Estimasi Saldo

Tabel 2.23. Komposisi Sumber Dana Belanja BPJPH

SUMBER DANA	TA 2021 (Rp)	TA 2022	TA 2023
Saldo Awal	14.000.000	14.000.000	17.090.257.931
PNBP BLU	45.000.000	9.304.922.574	12.037.718.000
Rupiah Murni	-	-	-

Estimasi saldo akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp25.890.257.931,-. Sebesar Rp8.800.000.000,- digunakan sebagai belanja operasional BPJPH berupa belanja barang dan jasa, sisanya akan diinvestasikan dalam bentuk deposito. Saldo awal tahun 2023 sebesar Rp17.090.257.931,- masih dalam bentuk investasi deposito, sedangkan proyeksi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp12.037.718.000,- akan dibelanjakan sebagai operasional layanan BPJPH berupa belanja barang dan jasa.

6. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2023

Tabel 2.24. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan	Target
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	10.442.200.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1.027.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	215.300.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	353.218.000
	Jumlah Pendapatan	12.037.718.000

Tabel 2.25. Target Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	275.289.786.000		
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	228.000.000.000	1.008.500 Sertifikat	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
2105. PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK	5.000.000.000	8.500 sertifikat	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	5.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2105. PDC.002	Sertifikat Halal UMK	223.000.000.000	1.000.000 Sertifikat	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	219.550.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	3.450.000.000		
	2. Belanja Modal			
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	24.523.129.000	35.670 Lembaga	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi	7.302.068.000	670 Lembaga/ Stakeholder	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	7.302.068.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	17.221.061.000	35.000 Lembaga/ Stakeholder	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	12.700.000.000		
	2. Belanja Modal			

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	4.521.061.000		
	2. Belanja Modal			
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	22.766.657.000	42 Kesepakatan	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal
2110. PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal	8.056.488.000	20 Dokumen	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	8.056.488.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2110. PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal	7.140.182.000	12 Dokumen	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	7.140.182.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2110. PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	7.569.987.000	10 Lembaga	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	3.503.330.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	4.066.657.000		
	2. Belanja Modal			
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	61.310.023.000	2 Layanan	Sekretariat
2111. EBA.962	Layanan Umum	24.643.074.000	1 Layanan	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	24.643.074.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
	2. Belanja Modal			
2111. EBA.994	Layanan Perkantoran	33.005.689.000	1 Layanan	
	I.RM			
	1. Belanja Barang	13.587.963.000		
	2. Belanja Modal			
	3. Belanja Gaji	19.417.726.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.749.300.000	24 Unit	
	I.RM			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	1.749.300.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.911.960.000	24 Unit	
	I.RM			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	1.911.960.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
JUMLAH		336.599.809.000		

Tabel 2.26. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2023

No.	Uraian	Volume	TA 2023 (Rp)
I	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		

No.	Uraian	Volume	TA 2023 (Rp)
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	15.000 Sertifikat	3.450.000.000
	Total Belanja Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		3.450.000.000
II	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6.500 Lembaga/ Stakeholder	4.521.061.000
	Total Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		4.521.061.000
III	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		

No.	Uraian	Volume	TA 2023 (Rp)
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	10 Lembaga	4.066.657.000
	Total Belanja Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		4.066.657.000
IV	Sekretariat		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		

No.	Uraian	Volume	TA 2023 (Rp)
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
	Total Belanja Sekretariat		
	TOTAL BIAYA		12.037.718.000

7. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Prakiraan maju pendapatan dan belanja BPJPH sebagaimana disajikan pada Tabel 2.27 dan 2.28.

Tabel 2.27. Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2022 s.d. 2026

Kode	Program/Kegiatan/ Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA	TA	TA	TA	TA
		2022	2023	2024	2025	2026
025.12. DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	8.798.000.000	11.684.500.000	14.021.400.000	16.825.680.000	20.190.816.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	7.775.000.000	10.942.200.000	12.530.640.000	15.036.768.000	18.044.121.600
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	7.775.000.000	10.942.200.000	12.530.640.000	15.036.768.000	18.044.121.600
2108	Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal	673.000.000	527.000.000	1.232.400.000	1.478.880.000	1.774.656.000
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	673.000.000	527.000.000	1.232.400.000	1.500.000.000	1.774.656.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	350.000.000	215.300.000	258.360.000	310.032.000	372.038.400
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	350.000.000	215.300.000	258.360.000	310.032.000	372.038.400
025.12. WA	Program Dukungan Manajemen	2.000.000	353.218.000	423.861.600	508.633.920	610.360.704
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2.000.000	353.218.000	423.861.600	508.633.920	610.360.704
	Jumlah Pendapatan	8.800.000.000	12.037.718.000	14.445.261.600	17.334.313.920	20.801.176.704

Tabel 2.28. Prakiraan Maju Belanja Tahun 2022 s.d. 2026

Kode	Program/ Kegiatan/ Output	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	8.800.000.000	6.450.000.000	7.840.000.000	9.493.000.000	11.868.600.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	3.553.468.000	3.450.000.000	4.140.000.000	4.968.000.000	5.961.600.000
2105. PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK					
	Volume Output					
2105. PDC.002	Sertifikat Halal UMK	3.553.468.000	3.450.000.000	4.140.000.000	4.968.000.000	5.961.600.000
	Volume Output	10.000 sertifikat	15.000 sertifikat	18.000 sertifikat	21.600 sertifikat	25920 sertifikat
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	2.075.000.000	4.521.061.000	2.500.000.000	3.125.000.000	3.907.000.000
2108. QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi	550.000.000				
	Volume Output	130 stakeholders				
2108. QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	1.525.000.000	4.521.061.000	2.500.000.000	3.125.000.000	3.907.000.000
	Volume Output	6.000 stakeholders	6.500 Lembaga	2.400 Lembaga	3125 Lembaga	3.907 Lembaga
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	3.171.532.000	4.066.657.000	1.200.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000
2110. PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal			600.000.000	700.000.000	1.000.000.000
	Volume Output			4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen
2110. PEC.002	Mou Jaminan Produk Halal					
	Volume Output					
2110. PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	3.171.532.000	4.066.657.000	600.000.000	700.000.000	1.000.000.000
	Volume Output	3 dokumen	10 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	8 Lembaga

Kode	Program/ Kegiatan/ Output	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama			6.605.261.600	7.841.313.920	8.932.576.704
2111	Layanan Dukungan Manajemen			6.605.261.600	7.841.313.920	8.932.576.704
2111. EBA.962	Layanan Umum			2.501.545.600	2.876.854.720	2.975.225.664
	Volume Output			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
2111. EBA.994	Layanan Perkantoran					
	Volume Output					
2111. EBB.951	Layanan Sarana Internal					
	Volume Output					
2111. EBB.971	Layanan Prasarana Internal			4.103.716.000	4.964.459.200	5.957.351.040
	Volume Output			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	TOTAL	8.800.000.000	12.037.718.000	14.445.261.600	17.334.313.920	20.801.176.704

Tabel 2.29. Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan

Pagu	Belanja	Pendapatan
2022	8.800.000.000	8.800.000.000
2023	12.037.718.000	12.037.718.000
2024	14.445.261.600	14.445.261.600
2025	17.334.313.920	17.334.313.920
2026	20.801.176.704	20.801.176.704

8. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (flexible budget). Dalam menentukan hitungan besaran ambang batas belanja tersebut, BLU BPJPH harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional BLU melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, BLU dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Dalam Rencana Bisnis dan Anggaran 2023 ini, BPJPH menetapkan ambang batas sebesar 10%. Maksudnya adalah, apabila target pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 melebihi dari yang telah ditetapkan, maka besarnya pengeluaran maksimal yang dapat dilakukan tanpa meminta izin Menteri Keuangan adalah sebesar target pengeluaran 2023 ditambah (10%) sepuluh persennya.

D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

BLU BPJPH sebagai satker yang menerapkan PPK BLU berkewajiban untuk mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait BLU antara lain PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PMK Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 76/PMK.06/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BLU BPJPH harus mengelola sistem laporan keuangan sesuai dengan standar Akuntansi pemerintah (SAP). Sebagai suatu entitas bisnis, BLU BPJPH juga harus melakukan pengelolaan keuangan dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, perlu disusun suatu sistem akuntansi tersendiri di BLU BPJPH yang mampu untuk mengakomodir berbagai kegiatan dan transaksi-transaksi keuangan BLU.

Sistem Akuntansi ini merupakan petunjuk (Pedoman) yang digunakan BLU BPJPH dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi atas berbagai transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan BLU BPJPH, yang mencakup Laporan Aktivitas/Operasional, Laporan Realisasi Keuangan (LRA), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas (LAK), dan catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Sistem Akuntansi BLU BPJPH dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan dan belanja kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;

- ❖ Menjadi dasar dalam rangka pencatatan akuntansi dengan sistem double entry;
- ❖ Menjadi pedoman dalam melaksanakan pencatatan transaksi keuangan sehingga dicapai akurasi pencatatan dan pengklasifikasian yang tepat; dan
- ❖ Mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dan tertib administrasi.

Dengan dibuatnya laporan keuangan yang sesuai kaidah yang ditetapkan dalam sistem akuntansi yang BLU BPJPH akan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan- keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

1. Rencana Inovasi

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung kegiatan dan kemandirian BLU, BPJPH membentuk Unit Pengembangan Usaha (UPU) yang tertuang dalam surat keputusan kepala BPJPH Nomor 124 tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengembangan Usaha Badan Layanan Umum BPJPH yang terdiri atas Kepala, Sekretaris, Ketua Divisi Layanan Unit Usaha Dalam Negeri, dan Ketua Divisi Layanan Unit Usaha Luar Negeri.

Dalam upaya pengembangan usaha, UPU menargetkan dalam dua periode, yakni jangka panjang dan pendek. Untuk periode jangka pendek, BPJPH akan mendirikan kantin halal, cafe halal, menyewakan aset tetap, dan mengoperasikan travel. Sedangkan jangka panjangnya BPJPH akan mendirikan plaza halal, dengan rincian sebagai berikut:

Jangka Pendek

1. Kantin Halal

- Menjual produk seperti kopi, roti, dan makanan pendukung lain yang telah bersertifikat halal.
- Mitra menjalin kerjasama sewa lahan pertahun dan sharing profit
- Lahan berukuran 7 x 10 meter di depan kantor BPJPH.
- Maksimal 3 mitra usaha (Per unit: 2,5 x 7 meter).

2. Cafe Halal

- Melayani pesanan catering untuk kegiatan rapat di BPJPH dan di lingkungan Kementerian Agama.
- Dropship System, kerjasama dengan pelaku usaha catering.
- Keuntungan dari margin harga.
- Membutuhkan satu pegawai untuk mengelola pemesanan kepada pelaku usaha catering.

3. Sewa Aset Tetap

- Sewa Ruang Penginapan (Kerjasama dengan Asrama Haji Pondok Gede, sebagai properti yang tidak terpakai dalam waktu tertentu).
- Sewa Kendaraan.
- Sewa Lahan Parkir.
- Sewa Ruang Rapat.
- Sewa Ruang Aula.
- Sewa Laboratorium.

4. Travel Halal

- Model bisnis berbentuk Partnership
- Menyediakan layanan reservasi hotel, kereta, bus, pesawat dan lain-lain.

- Melayani kebutuhan pegawai BPJPH dalam melakukan setiap perjalanan dinas.
- Melayani masyarakat umum

Jangka Panjang

5. Plaza Halal

- Revitalisasi Gedung BPJPH Lama
- evitalisasi gedung lama BPJPH.
- 3 Jenis Mitra menjalin kerjasama sewa gedung dan sharing profit (Kantor Kas Perbankan, ATM Center Halal
- Kuliner, dan Minimarket).
- Memiliki Display Halal untuk produk yang terdaftar di
- BPJPH.
- Memiliki kantor Travel Halal BPJPH.
- Memiliki Videotron untuk mengoptimalkan sumber pendanaan.
- Perkiraan biaya revitalisasi sebesar 5 Milyar





BAB III

PENUTUP

A. ANALISIS

1. Produktivitas

Berdasarkan hasil analisis dengan membandingkan jumlah output yang dicapai dan input sumber daya sebagai berikut:

- a. Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM)

$$\text{ROLSDM} = \frac{\text{Jumlah Output Layanan}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$\text{ROLSDM} = \frac{1.008.500}{203}$$

$$\text{ROLSDM} = 4.968$$

- b. Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM)

$$\text{RPSDM} = \frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$\text{RPSDM} = \frac{\text{Rp}12.037.718.000}{203}$$

$$\text{RPSDM} = \text{Rp}59.299.103$$

- c. Peningkatan Jumlah Output Layanan (PJOL)

$$\text{PJOL} = \text{PJOL TA(X)} - \text{PJOL TA(X-1)}$$

$$\text{PJOL} = 1.008.500 - 367.804 = 640.696$$

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas dapat dikatakan bahwa BLU BPJPH cukup produktif, yakni satu orang pegawai dapat menghasilkan output sebanyak 4.968 per tahun dan menghasilkan pendapatan BLU sebesar Rp59.299.103 per tahun, serta peningkatan output ditahun 2023 sebanyak 640.696.

2. Efisiensi

Merupakan kebijakan mengoptimalkan belanja dengan analisis sebagai berikut:

- a. Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL)

$$\text{RBOL} = \frac{\text{Belanja}}{\text{Jumlah Layanan}}$$

$$\text{RBOL} = \frac{336.599.809.000}{1.008.500}$$

$$\text{RBOL} = 333.763$$

- b. Rasio belanja operasional dengan pendapatan operasional (BOPO)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

$$\text{BOPO} = \frac{336.599.809.000}{12.037.718.000}$$

$$\text{BOPO} = 28$$

Berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa BLU BPJPH cukup efisien dengan membandingkan rasio belanja dan jumlah layanan yang diinterpretasikan satu sertifikat memerlukan belanja sebesar Rp333.763 atau dengan membandingkan belanja operasional dan pendapatan operasional yang diperoleh angka 28.

3. Inovasi

Dalam upaya pengembangan usaha, BPJPH berinovasi dengan mendirikan Unit Pengembangan Usaha (UPU). Dalam jangka pendek UPU akan mendirikan kantin halal, cafe halal, menyewakan aset tetap, dan mengoperasikan travel. Sedangkan, dalam jangka panjang UPU BPJPH akan mendirikan plaza halal dengan merevitalisasi gedung lama BPJPH.

4. Keselarasan dan Kesesuaian

- a. Jenis layanan yang diberikan oleh BLU telah sesuai dengan tugas dan fungsi BLU yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- b. Target kinerja BLU selaras dengan dengan RPJMN dan prioritas pembangunan nasional, yakni PN 4: revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Namun demikian, target layanan dan pendapatan BLU masih belum dapat tercapai optimal seperti yang dituangkan dalam RSB sebesar Rp968.812.292.639, dikarenakan adanya regulasi baru yang mempengaruhi bisnis proses BPJPH, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga BPJPH perlu mensosialisasikan kembali proses sertifikasi halal, utamanya kepada Pelaku UMK yang dibiayai pemerintah. Selain itu, penetapan tarif yang disahkan pada bulan Juni tahun 2021 juga menjadi kendala BPJPH dalam memberlakukan tarif layanan kepada stakeholder terkait sebelum peraturan tarif tersebut disahkan.

B. KESIMPULAN

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran BPJPH tahun anggaran 2023 yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan pencairan dana PK- BLU atas beban APBN dan PNBPN.

Pada tahun 2023, diproyeksikan pendapatan dari penerbitan sertifikat halal mencapai Rp 10.942.200.000, pembinaan dan pelatihan sebesar Rp 527.000.000, akreditasi lembaga sebesar Rp215.300.000, dan layanan data serta sewa ruang sebesar Rp 353.218.000, sehingga total pendapatan mencapai sebesar Rp12.037.718.000.

Tabel 3.1. Analisis Aspek Keuangan

No	Uraian	2022 (prognosa)	2023 (proyeksi)
1.	Saldo Awal	14.000.000	17.090.257.931
2.	Belanja BLU	188.802.163.000	336.599.809.000
3.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
4.	Pendapatan BLU	8.800.000.000	12.037.718.000
5.	Penerimaan Pembiayaan	-	-
6.	Kebutuhan Rupiah Murni	180.002.163.000	324.562.091.000

berdasarkan tabel di atas di proyeksikan

- ❖ Terdapat saldo awal Rp17.090.257.931, yang berasal dari perhitungan saldo akhir RBA TA 2022, dan akan digunakan Rp17.090.257.931 untuk diinvestasikan dalam bentuk deposito.
- ❖ Direncanakan belanja sebesar 336.599.809.000
- ❖ Direncanakan pendapatan Rp12.037.718.000 akan dibelanjakan sebesar Rp12.037.718.000 .
- ❖ Rencana saving dana untuk tahun berikutnya sebesar 17.090.257.931
- ❖ Berdasar rencana tersebut, BLU membutuhkan Rupiah Murni APBN sebesar 324.562.091.000

C. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam pelaksanaan BLU, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah kewenangan yang diamanatkan undang-undang JPH kepada BPJPH luas, maka tidak dimungkinkan pelaksanaan seluruh kewenangan BPJPH pembiayaannya dibebankan pada tarif layanan jaminan produk halal, kewenangan ini seperti terlihat dalam pemetaan sumber pendanaan yang telah dilakukan BPJPH dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPJPH

Kewenangan	Fungsi	Sumber Pembiayaan	
		RM	PNBP
merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH	Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH		√	
menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk	pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal		√
melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri			√
melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal		√	
melakukan akreditasi terhadap LPH			√
melakukan registrasi Auditor Halal			√
melakukan pengawasan terhadap JPH	pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
melakukan pembinaan Auditor Halal	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH		√	
	pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	√	
	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri	√	